

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu yang panjang atau long term, dalam pembangunan tersebut terdapat berbagai kemajuan yang cukup pesat untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah, namun juga terdapat berbagai permasalahan yang sulit untuk diatasi, yaitu terdapat tingkat kesenjangan atau ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, strategi dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan pemerintah daerah di masa lampau yang telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan telah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat daerah secara agregat relative stagnan, ini berarti bahwa peran dan partisipasi pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi masih belum maksimal.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pemerintah dan seluruh masyarakat mengelola berbagai sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan merangsang pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999; Blakely E. J, 1989). Keberhasilan dalam meaksanakan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yakni struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Disini proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoritikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoritikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan (Produk Domestik Bruto) PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat (Arsyad, 1999)

Ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan aspek yang umum terjadi, ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya ketidakmerataan pembangunan ekonomi yaitu 1) perbedaan kandungan sumber daya alam, 2) perbedaan kondisi geografis, 3) kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Selain itu masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya meliputi wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi melainkan juga antar Pulau Jawa dan luar Jawa. Berbagai program telah dikembangkan untuk mengurangi maupun menghilangkan ketimpangan antardaerah selama ini ternyata masih belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrument untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tampaknya perlu

diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan regional (Majidi, 1997).

Ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah maupun daerah dapat dianalisis dengan perhitungan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan penduduk suatu wilayah. Dengan garis besar, apabila angka indeks kesenjangan Williamson mendekati nol, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin rendah dan apabila angka indeks Williamson menunjukkan kesenjangan mendekati satu, maka menunjukkan kesenjangan semakin tinggi.

Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari permasalahan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar kab/kota. Sehingga proses pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi di daerah tersebut dapat dimaksimalkan dan diminimalisir tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi tersebut kearah pemerataan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan yang kompetitif di setiap daerah untuk dikembangkan. Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai objek penelitian pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan dikarenakan ingin mengetahui seberapa besar perbedaan pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah dan dampak yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah atau kabupaten di Provinsi Jawa Timur berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita serta untuk mengetahui ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016”**.

B. Perumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang ada, dapat disimpulkan rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Bagaimana klasifikasi masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan tipologi klassen Tahun 2012-2016?
2. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini ditujukan pada masalah pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni pada tahun 2012 sampai dengan 2016 yang terjadi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur. Batasan

masalah yang diambil dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) variable independent yaitu pertumbuhan ekonomi. Dan dalam menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan hanya menggunakan alat analisis Indeks Williamson.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan :

1. Untuk mengetahui klasifikasi masing-masing wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan tipologi klassen.
2. Untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan pembangunan masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

2. Manfaat :

1. Bagi pihak pemerintah, sebagai bahan informasi dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, sehingga terjadi akselerasi pembangunan yang merata antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Bagi akademik, diharapkan penelitian ini sebagai bahan kajian dan menjadi acuan untuk pembaca. Serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.